

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jaditidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006: 195).

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2005: 249). Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2006: 333).

Jenis-jenis pengangguran menurut Edwards dalam Arsyad (2016:359), adalah:

1. Pengangguran terbuka, yaitu baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan).
2. Setengah menganggur (*underemployment*): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka mampu untuk kerjakan.
3. Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*), yaitu para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.
4. Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*): yaitu orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya
5. Pensiun lebih awal. Fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa Negara, usia pensiun dipermuda sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi kaum muda untuk dapat menduduki jabatan di atasnya.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno dalam Putri dan Subroto (2015: 3) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana

terjadinya perkembangan GNP yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat (Murni, 2009: 169).

Kuznets dalam Hariyanto (2005: 57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006: 9).

Menurut Boediono (2009: 15), pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Persentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Sedangkan menurut Tambunan (2009: 44), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan seluruh ekonomi negara Indonesia. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara di Afrika merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut (stagnasi). Oleh karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ekonom, baik dari negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara industri maju.

Menurut Faried dalam Raharjo (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terdiri dari dua konsep yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan pendapatannasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil. Output riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi pertumbuhan, statis ataupun penurunan, di mana pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat positif sedangkan penurunan merupakan perubahan negatif.
2. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output total riil perkapita. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tingkat kenaikan output total riil $>$ daripada tingkat pertambahan penduduk, sebaliknya terjadi penurunan taraf hidup actual bila laju kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada laju pertambahan output total riil.

2.1.3 Upah Minimum

UU No 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 30 tentang Tenaga Kerja, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang, melalui perjanjian kerja, imbalan jasa diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya. Dalam pengertian teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha (Sukirno, 2006:353). Sedangkan menurut Sinungan (2000:90) upah kerja adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk.

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang. Oleh karena itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran tersebut dapat dinilai dan diukur dengan Kebutuhan Hidup Minimum atau sering disebut Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Semuanya ini merupakan tanggung jawab semua masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri untuk menjamin kebutuhan hidup minimum setiap pekerja dapat terpenuhi melalui pekerjaan yang dia lakukan.

Menurut Sumarsono (2003:141) upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Sedangkan Upah Pokok Minimum adalah upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral, maupun sub sektoral. Dalam Peraturan Pemerintah yang diatur secara jelas hanya

upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan. Menurut Case dan Fair (2005:533) yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah paling rendah yang diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan kepada para pekerjanya.

Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai ketenagakerjaan khususnyadalam sistem penentuan upah telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan. Dalam pasal 88 UU No.13 Tahun 2003disebutkan:

1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Upah minimum
 - b. Upah kerja lembur
 - c. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain dilakukan pekerjaannya.
 - d. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
 - e. Bentuk dan cara pembayaran upah.
 - f. Denda dan potongan upah
 - g. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
 - h. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional.

- i. Upah untuk pembayaran pesangon dan
 - j. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan
4. Kebutuhan hidup Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) berdasarkan layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

Penetapan upah minimum dipandang sebagai sarana atau instrumen kebijaksanaan yang cocok untuk mencapai kepastian dalam hubungan kerja. Menurut Payaman J. Simanjuntak (2002: 45) tujuan penetapan upah minimum adalah:

1. Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, sehingga mereka bersedia menerima upah dibawah tingkat kelayakan;
2. Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungannya;
3. Sebagai jaring pengaman untuk menjaga tingkat upah karena satu dan lain hal jangan turun lagi;
4. Mengurangi tingkat kemiskinan absolut pekerja, terutama bila upah minimum tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya;
5. Mendorong peningkatan produktivitas melalui perbaikan gizi dan kesehatan pekerja maupun melalui upaya manajemen untuk memperoleh kompensasi atas peningkatan upah minimum;

6. Meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum;
7. Menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan harmonis

2.1.4 Inflasi

Inflasi menurut Case and Fair (2007: 447) dalam Putridan Subroto (2015 : 2) adalah peningkatan tingkat harga secara keseluruhan. Hal ini terjadi ketika harga-harga meningkat secara bersamaan. Sedangkan menurut Djohanputro (2006:69) inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum. Sedangkan menurut Soesastro (2005) Inflasi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediannya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kesehatan ekonomi. Lebih lanjut Sukirno dalam Putro dan Setiawan (2013) menjelaskan bahwa Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu.

Boediono (2009:7), mengemukakan bahwa definisi inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga-harga barang lain. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus-menerus juga perlu diingat. Kenaikan harga-harga karena, misalnya musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak

mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau “penyakit” ekonomi yang tidak memerlukan kebijakan khusus untuk menanggulangnya.

Menurut Prathama (2008), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu, yaitu berikut:

a. Indeks harga konsumen (*consumer price index* atau *CPI*).

Indeks harga konsumen atau disingkat IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Dalam indeks harga konsumen, setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan atau bobot tetap yang proporsional terhadap kepentingan relatif dalam anggaran pengeluaran konsumen.

b. Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai Indeks Harga Produsen (*producer price index*). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

c. Indeks harga implisit (*GNP Deflator*)

Indeks harga implisit (*GNP Deflator*) adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100. GNP Riil adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan didalam perekonomian, yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar (*base year*).

Samuelson dalam Johan, Martowo, dan Pratiwi (2016) menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis inflasi yaitu sebagai berikut:

a. Penggolongan berdasarkan sifatnya.

1. Inflasi ringan ($< 10\%$ setahun), ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relative
2. Inflasi sedang (10% - 30% setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.
3. Inflasi berat (30% - 100% setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya.
4. Hiper inflasi ($>100\%$ setahun), di mana inflasi ini paling parah akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ditukar dengan barang. Harga-harga naik lima sampai enam kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak uang.

b. Berdasarkan sebab terjadinya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Nopirin 1992 dalam Vio Achfuda, 2010:41):

1. *Demand Pull Inflation*

Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat terhadap akan berbagai barang terlalu kuat. *Demand pull inflation* terjadi karena kenaikan permintaan agregat di mana kondisi perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh. Kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output ataupun produksi tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga yang disebut inflasi murni. Kenaikan permintaan yang melebihi produk domestik bruto akan menyebabkan *inflationary gap* yang menyebabkan inflasi.

2. *Cost Push Inflation*

Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Pada Cost Push Inflation tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran agregat terus menurun karena adanya kenaikan biaya produksi. Inflasi dan pengangguran dapat memiliki hubungan positif ataupun negatif. Hubungan positif terjadi apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi akan berakibat pada peningkatan tingkat

bunga simpanan dan pinjaman. Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno 2008: 152).

2.1.5 Investasi

Investasi menurut Sukirno (2006: 121) dalam Marwoto et al (2016: 23) diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian di masa yang mendatang. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin, 2010:2). Lebih lanjut Bodie, Kane, dan Marcus (2007: 2) menjelaskan bahwa komitmen atas sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan menuai manfaat di masa depan. Kemudian Sunariyah (2013:4) mendefinisikan investasi sebagai suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang.

Jenis-jenis investasi (penanaman modal), yaitu antara lain (Marwotodan Pratiwi, 2016 :23):

1. *Autonomous Investment*

Investasi ini dilakukan oleh pemerintah (*public investment*). Investasi ini bila dilakukan dalam jumlah besar juga tidak memberikan profit, maka swasta tidak mampu melakukan investasi jenis ini yang dikarenakan tidak memberikan profit langsung.

2. *Induced Investment*

Investasi ini timbul akibat adanya pertumbuhan permintaan yang efektif yang terjadi di pasar. Kenaikan permintaan efektif disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

3. *Domestic Investment* dan *Foreign Investment*

Domestic Investment adalah penanaman modal dalam negeri. *Foreign Investment* adalah penanaman modal asing.

4. *Gross Investment* dan *Net Investment*

Gross Investment adalah total keseluruhan investasi yang diadakan atau dilakukakan suatu waktu. *Net Investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.

Investasi atau penanaman modal di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok menurut (Widjaya, dalam Pratiwi et al 2016), yaitu:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

PMDN adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/

disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang PMA yang mengatur mengenai pengertian modal asing. PMDN juga merupakan penggunaan kekayaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut ketentuan UU mengenai penanaman modal.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA hanya meliputi PMA langsung yang dilakukan berdasarkan UU Tahun 1967 No. 01 dan yang digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia. Artinya pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesebroto dalam Rahayu (2011) menyatakan bahwa Hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peran investasi swasta sudah semakin besar. Peran pemerintah tetap besar pada tahap menengah dikarenakan peran swasta yang semakin besar banyak menimbulkan kegagalan pasar (market failure), sehingga

juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa dalam kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga harus melindungi buruh yang erada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Dalam suatu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil.

Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya (Mangkoesobroto, 2002 dalam Rahayu, 2011). Sedangkan Menurut Wagner ada 5 hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat adalah: a) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, b) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, c) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, d) Perkembangan demokrasi dan e) Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy dalam Rahayu, 2011).

Mangkoesobroto dalam Rahayu (2011) menyebutkan bahwa di dalam perekonomian modern selalu ada peranan investasi pemerintah yang diklasifikasikan menjadi 3 golongan besar adalah:

1. Peranan Alokasi

Sumber daya yang dimiliki digunakan untuk menghasilkan *private good* dan *public good*. *Private good* adalah barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh system pasar yaitu melalui

transaksi antara penjual dan pembeli. Namun, tidak semua kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan untuk barang dan jasa yang tidak disediakan oleh sistem pasar sehingga perlu dialokasikan oleh Negara disebut dengan *public good*

2. Peranan Distribusi

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan, salah satunya yaitu dengan cara menerapkan sistem pajak progresif ialah beban pajak yang lebih besar dikenakan bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, yang disertai dengan subsidi kepada kelompok miskin. Melalui subsidi, pemerintah secara tidak langsung bisa mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijakan anggaran misalnya dengan memberikan kredit perumahan murah untuk golongan berpendapatan rendah, subsidi pupuk untuk petani.

3. Peranan Stabilitas

Pemerintah selain memiliki peranan sebagai alokasi dan distribusi, pemerintah juga memiliki peranan sebagai stabilator perekonomian. Hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah yang berupaya menjaga terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Sukirno dalam Rahayu (2011), jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor yang penting, diantaranya adalah : jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pertimbangan politik dan keamanan.

Dalam Rahayu (2011), pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi 2 klasifikasi, yaitu:

1. Aparatur Daerah, adalah pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintah sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain.
2. Pelayanan Publik, adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Lee Robert, dan R. W. Johnson dalam Adi Raharjo (2006) Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang

publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-Prop-Kab/Kota). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda, dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintahan yang lebih tinggi.

Menurut Mangkoesubroto dalam Rahayu (2011) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian (Rahayu, 2011).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulhanafi, Aimon, dan Syofyan (2013) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas dan Tingkat Pengangguran”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh

pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia; (2) menganalisis produktivitas, pertumbuhan ekonomi, investasi, belanja pemerintah, upah dan inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Two Stages Least Squared* (TSLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendidikan kesehatan dan signifikan terhadap produktivitas di Indonesia; (2) Produktivitas, ekonomi Pertumbuhan, investasi, belanja pemerintah, dan upah mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia secara signifikan.

Penelitian kedua yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Maravian, Qosjim, Khomariyah (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 1986–2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pertumbuhan produk domestik bruto, laju inflasi dan jumlah angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Produk domestik bruto secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka karena pertumbuhan produk domestik bruto merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia; (2) Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan karena kenaikan permintaan.

Penelitian ketiga yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Putro dan Setiawan (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban/Tanggungans Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDB, upah, inflasi, dan rasio Ketergantungan terhadap tingkat pengangguran di Magelang dan menganalisis faktor-faktor yang paling berpengaruh kuat terhadap tingkat pengangguran di Magelang pada tahun 1990-2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran; (2) Variabel Inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan arah positif; (3) Variabel upah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran; (4) Variabel beban tanggungan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran; (5) Hasil pengujian regresi pengaruh UMK terhadap tingkat pengangguran.

Penelitian keempat yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Panjawa dan Soebagiyo (2014) dengan judul “Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu tingkat pengangguran se-Karesidenan Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi data

Panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 1999-2013; (2) Upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 1999-2013; (3) Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 1999-2013; (4) Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 1999-2013.

Penelitian kelima yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sirait dan Marhaeni (2013) dengan judul “Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali; (2) Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan, upah minimum kabupaten berpengaruh negatif signifikan sedangkan tingkat pendidikan negatif tidak nyata terhadap jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali; (3) Variabel bebas yang memiliki kontribusi terbesar terhadap variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 0,663 atau sebesar 66,3 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian keenam yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Putrid dan Subroto (2013) dengan judul “Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2003-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data time series selama duabelas tahun yaitu tahun 2003-2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2003-2014 dengan tanda positif atau searah; (2) Upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2003-2014 dengan tanda negatif atau tidak searah; (3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2003-2014 dengan tanda positif atau searah; (4) Inflasi, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2003-2014.

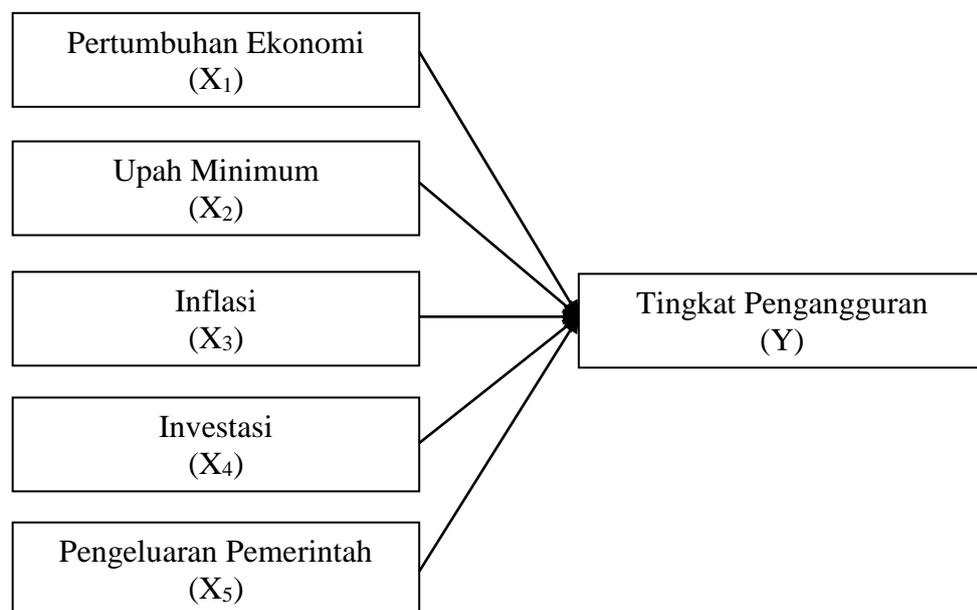
Penelitian ketujuh yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Johan, Pratiwi, dan Marwoto (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi mempengaruhi variabel terikatnya adalah pengangguran. Metode analisis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, analisis regresi linier berganda dan koefisien determinasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengolahan data statistik menggunakan NCSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan Investasi secara simultan berpengaruh terhadap penangguran di Indonesia; (2) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penangguran di Indonesia; (3) Inflasi memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap penangguran di Indonesia; dan (4) Investasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penangguran di Indonesia.

Penelitian kedelapan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Adi Raharjo (2006) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (Studi Kasus di Kota Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengalokasian pengeluaran pemerintah daerah serta mengkaji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Semarang. Analisis regresi yang digunakan adalah OLS dengan bantuan perangkat lunak SPSS 11.5. Pengolahan data statistik menggunakan NCSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah (rutin) dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah (pembangunan) dan angkatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang

peningkatan variabel investasi swasta dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

H₁ : Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat pengangguran.

H₂: Diduga upah minimum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat pengangguran .

H₃ : Diduga inflasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat pengangguran.

H₄ : Diduga investasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat pengangguran.

H₅ : Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat pengangguran.